

**MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA
(Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

(Tesis)

Oleh

**FAISHAL HUDA
NPM: 2226021012**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA
(Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

**FAISHAL HUDA
NPM: 2226021012**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA (Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

FAISHAL HUDA

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penyebab konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Marga Tiga dan menganalisis manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik yaitu negosiasi dan arbitrase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang melibatkan masyarakat yang terdampak, Kepala Desa Trimulyo, Pengamat Politik Universitas Lampung, PPK Bendungan Marga Tiga, BPN Lampung Timur dan NGO. Hasil penelitian menunjukkan penyebab konflik adalah 1) Perbedaan jumlah tanaman antara masyarakat dengan pemerintah. 2) Lamanya proses ganti rugi lahan yang akan terkena genangan air bendungan. 3) Lambatnya pemerintah dalam merespon kepentingan masyarakat 4) Berkembang persepsi di kalangan masyarakat bahwa terjadi suap dalam proses pembebasan lahan. Manajemen Konflik yang dilakukan oleh pemerintah adalah negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dilaksanakan Pemerintah Bersama masyarakat terdampak genangan Bendungan Marga Tiga tiga kali namun tidak mencapai kesepakatan dan pemerintah melakukan arbitrase dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan Bendungan Marga Tiga. Hal itu membuat konflik berlarut-larut dari tahun 2022 hingga tahun 2025 ini belum tuntas karena penyebab konflik tidak terselesaikan.

Kata Kunci: Proyek strategis nasional, Manajemen Konflik, Bendungan Marga Tiga.

ABSTRACT

LAND ACQUISITION CONFLICT MANAGEMENT FOR THE MARGA TIGA DAM NATIONAL STRATEGIC PROJECT (Study in Trimulyo Village, Sekampung District, East Lampung Regency)

By

FAISHAL HUDA

The conflict over land acquisition for the Marga Tiga Dam national strategic project began in 2022. The purpose of this study is to explain the causes of the conflict over land acquisition for the construction of the Marga Tiga Dam and to analyse the conflict management carried out by the East Lampung Regency government. This study uses conflict management theories, namely negotiation and arbitration. The method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques involved interviews with affected communities, the Head of Trimulyo Village, a political observer from the University of Lampung, the Marga Tiga Dam Project Implementation Unit, the East Lampung National Land Agency, and NGOs. The results of the study show that the causes of conflict are 1) Differences in the number of crops between the community and the government. 2) The length of the compensation process for land that will be flooded by the dam. 3) The slow response of the government to the interests of the community. 4) The perception among the community that bribery occurred in the land acquisition process. Conflict management carried out by the government was negotiation and arbitration. The government held three rounds of negotiations with the communities affected by the Marga Tiga Dam flooding, but no agreement was reached, and the government resorted to arbitration to resolve the conflict over land acquisition for the Marga Tiga Dam. This has caused the conflict to drag on from 2022 to 2025 without resolution because the causes of the conflict have not been addressed.

Keywords: National Strategic Project, Conflict Management, Marga Tiga Dam.

Judul Tesis : **MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA (Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

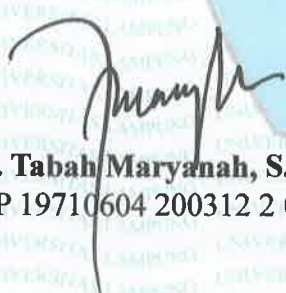
Nama Mahasiswa : **Faishal Huda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2226021012**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP 19710604 200312 2 001


Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
NIP. 19780403 200812 1 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si

Sekretaris

: Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP <.....

Penguji

Bukan Pembimbing:

: Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 04 Agustus 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA (Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



FAISHAL HUDA
NPM: 2226021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Faishal Huda, tempat tanggal lahir di Sukaraja Tiga, 08 Mei 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Suyadi, S.Pd dan Ibu Kamirah. Penulis memiliki seorang kakak pertama laki-laki yang bernama Ahmad Sodiq dan seorang kakak kedua perempuan yang bernama Istiqomah, A.Md.,Keb. Penulis memiliki istri yang bernama Gabrila Nur Intan, S.E yang dinikahinya pada tanggal 11 November tahun 2023. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2005 – 2011 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sukaraja Tiga. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011 – 2014 di SMP Negeri 2 Marga Tiga. Kemudian, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 – 2017 di SMA Negeri 4 Metro. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan Strata I di Universitas Lampung (UNILA) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021.

Saat ini, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Lampung dengan program studi Magister Ilmu Pemerintahan Kosentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Pekerjaan saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penulis menjadi PNS pada tahun 2025 dan memulai karier di Kecamatan Marga Tiga sampai saat ini. Saat ini penulis menjabat sebagai Pelaksana Penata Kelola Pemerintahan dibawah Seksi Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga.

MOTTO

**“ALLAH SWT TIDAK MEMBEBANI SESORANG
MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA”
(QS. Al-Baqarah : 286)**

Jangan biarkan kegagalan menghalangimu untuk
mencoba lagi, karena setiap kegagalan membawa
pelajaran berharga yang akan membawamu lebih
dekat dengan kesuksesan

(unknown)

“Jangan pantang menyerah teruslah
bersemangat dan selalu positif
thinking. yakinlah bahwa apa yang
terjadi di Dunia ini semua atas
kehendak Allah SWT. Manusia hidup
dengan ujian dan cobaannya yang
berbeda-beda dan yakinilah dibalik
itu semua pasti akan ada hikmahnya
(Faishal Huda)

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang luar biasa dalam hidup
saya*

Orangtua Tercinta

Bapak Alm. Suyadi, S.Pd dan Ibu Kamirah

Istri Tercinta

My Love Gabrila Nur Intan, S.E

Kakak Tersayang

Ahmad Sodik dan Istiqomah, A.Md.,Keb

Orangtua Mertua

Bapak Hi.Sasmita dan Ibu Nur laili

*Terima kasih atas doa, dukungan serta semangat yang diberikan kepadaku untuk
menyelesaikan tesis ini, semoga ini menjadi wujud baktiku untuk membuat kalian
bangga dan semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian.*

Serta

Almamaterku tercinta,

Universitas Lampung (UNILA)

SANWACANA



Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“MANAJEMEN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNGAN MARGA TIGA (Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam tesis ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhardi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing

Pendamping penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang ibu sampaikan sehingga memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan Ibu dan Ibu selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;

6. Ibu Dr. Tabah Maryana, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan proses bimbingan tesis dari awal sampai terselesaikannya tesis ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian tesis dengan baik, selalu memberikan semangat dalam proses pembimbingan. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga ibu sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya;
7. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A sebagai Dosen Penguji yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat serta saran, baik tentang perkuliahan maupun tentang hal lainnya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan ibu serta selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
8. Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat serta sarannya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak serta selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
9. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi;
10. Kedua orangtua tercinta, Alm. Bapak Suyadi, S.Pd dan Ibu Kamirah terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan serta doa, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi dan segalanya sehingga penulis sampai di titik ini. Studi Magister ini merupakan cita-cita kehendak bapak dulu, insyaallah bapak disurga senang sekali melihat penulis yang telah menyelesaikan studi S2 nya. Untuk ibu tercinta Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan membalas seluruh kebaikan serta perjuangan kalian;
11. Istri tercinta my love Gabriela Nur Intan, S.E terimakasih atas dukungan dan support yang sangat luar biasa serta doa, cinta kasih sayang, semangat, motivasi sampai penulis dititik ini. Sudah setia menemani sampai dititik ini dan selalu ada di setiap kesempatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
12. Kakakku tersayang Ahmad Sodiq terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusanmu, sukses dalam segala hal ;
13. Mbakku tersayang Istiqomah, A.Md., Keb terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusanmu, sukses dalam segala hal ;

14. Kedua orangtua mertuaku, Hi. Sasmita dan Ibu Nur Laili terimakasih atas segala dukungan, support, semangatnya sampai penulis dititik ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta dalam segala urusannya semua dipermudah.
15. Keluarga besar trah mbah Abu Rejo dan Bani Muhdi yang selalu memberikan doa, saran, motivasi dan dukungan dalam hal apapun. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan kalian dan memberikan kelancaran dalam setiap urusannya;
16. Bapak Camat Marga Tiga Sarminsyah, S.ST dan bapak seccam Marga Tiga Syarifuddin, S.Kep.Ners terimakasih atas segala support dan dukungannya dan izin yang telah diberikan untuk menyelesaikan studi S2 ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan kalian dan memberikan kelancaran dalam setiap urusannya;
17. Rekan kerja di Kantor Kecamatan Marga Tiga terimakasih atas segala support dan dukungannya Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan kalian dan memberikan kelancaran dalam setiap urusannya;
18. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Badan Pertanahan Nasional Lampung Timur;
19. Seluruh rekan-rekan MIP 2022;
20. Seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif;
21. Kepada Faishal Huda terimakasih telah berjuang menyelesaikan yang sudah dimulai. Dengan pekerjaan yang luar biasa menyita waktu, tenaga dan fikiran. Serta ujian cobaan keluarga yang sangat luar biasa, Alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang lapang.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tesis ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. Penulis berharap Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan dan kesehatan atas apa yang sudah diberikan kepada penulis baik semangat, dukungan moril maupun materiil. Akhir kata semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2025
Penulis

Faishal Huda

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Masalah	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Pengertian Konflik	13
2.2 Manajemen Konflik	14
2.3 Kerangka Pemikiran	22
 III. METODE PENELITIAN.....	 23
3.1 Tipe Penelitian.....	23
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Penentuan Informan.....	24
3.4 Jenis-Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.8 Teknik Validasi Data	31
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 33
4.1 Proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga	33
4.2 Peta Konflik Bendungan Marga Tiga	41
4.3 Manajemen Konflik Bendungan Marga Tiga	45
4.3.1 Negosiasi Pada Konflik Bendungan Marga Tiga.....	49
4.3.2 Arbitrase Pada Konflik Bendungan Marag Tiga.....	75
 V. KESIMPULAN DAN SARAN	 93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan	25
2. Pihak Yang Berkonflik.....	44
3. Ringkasan Konflik	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proyek strategis nasional	3
2. Kerangka Pemikiran.....	22
3. Bendungan Marga Tiga.....	38
4. Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Marga Tiga	51
5. Pembangunan Marga Tiga Tahun 2020	54
6. Unjuk Rasa Warga Desa Trimulyo	64
7. Kunjungan Komisi I DPRD.....	65
8. Unjuk Rasa UGR	67
9. Pembangunan Bendungan Marga Tiga Tahun	72
10. Audit Menggunakan Citra Satelit	77
11. Penangkapan Korupsi Pembangunan Bendungan Marga Tiga	79
12. Penyitaan Barang Bukti Korupsi	81
13. FGD Bersama DPR RI	85

DAFTAR SINGKATAN

1. PSN	:Proyek strategis nasional
2. SDA	:Sumber Daya Alam
3. DITJEN	:Direktorat Jenderal
4. PUPR	:Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. DPRD	:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. BPKP	:Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. P2T	: Panitia Pengadaan Tanah
8. FGD	: Forum Grup Diskusi
9. DKH	: Desa Kawasan Hutan
10. UGR	: Uang Ganti Rugi
11. LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
12. AKR	: Anas Karim Rivai
13. BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat Indonesia dengan segala permasalahan yang ada menjadi kajian menarik. Adanya tujuan kepentingan untuk hidup di lingkungan masyarakat membawa dampak pada kondisi rawan terjadinya benturan-benturan di dalam lingkup masyarakat. Hal ini menjadi pemicu terciptanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya kepentingan yang terselip pada setiap individu, pengaruh dan kekuasaan sampai motif ekonomi akan semakin mempercepat terjadinya konflik. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016, Proyek strategis nasional (PSN) didefinisikan sebagai proyek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Proyek-proyek ini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek strategis nasional (PSN) adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan usaha di Indonesia, yang memiliki karakteristik strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tujuan utama dari Proyek strategis nasional (PSN) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) dan industri Sumber Daya Alam (SDA) juga menimbulkan kerusakan alam dan konflik-konflik yang membara (Harmen, 2023).

Dalam memenuhi ambisi proyek-proyek ini negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*Excessive use of force*) kepada warga yang mempertahankan tanah, air dan ruang hidupnya melalui aparat negara yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Secara umum, deretan konflik agraria disertai kekerasan negara terhadap rakyatnya disebabkan oleh corak/paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi bukan berbasis hak. Pembangunan yang menghamba pada investor dan dilegitimasi oleh UU Cipta Kerja serta turunannya, UU Minerba, dll yang dibuat secara sewenang-wenang dan melanggar konstitusi. Pemerintah juga melegalkan perampasan-perampasan tanah rakyat atas nama Hak Pengelolaan atau klaim tanah negara. Pembangunan-pembangunan ini sarat akan konflik kepentingan bisnis dan politik; dan penyelesaian konflik menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan. Di sisi lain, kebijakan terkait reforma agraria rezim Jokowi disimplikasi dengan bagi-bagi tanah, bukan pada substansi perombakan struktur timpang penguasaan lahan (LBH, 2023)

Adanya manajemen konflik yang dilakukan karena timbulnya suatu konflik pasti memiliki penyebab, setiap konflik akan terus terjadi. Sebuah organisasi publik yang sering mengalami konflik dan memiliki manajemen konflik yang baik sehingga mampu menyelesaikan konflik artinya organisasi publik tersebut sudah terbiasa menyelesaikan konflik dengan tepat dan organisasi publik tersebut akan lebih mampu bertahan karena sudah biasa menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik. Setiap Proyek strategis nasional (PSN) pasti ada yang memiliki konflik. Konflik terkait dengan analisa dampak lingkungan terjadi ketika suatu proyek mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan atau bahkan mengancam kelestarian lingkungan. Konflik juga berpotensi hadir pada permasalahan pembebasan tanah. Konflik terjadi ketika warga sebagai pemilik tanah tidak menerima aspek pembebasan tanah terutama mengenai kompensasi pembebasan tanah atau juga karena pertimbangan produktivitas tanah dalam jangka panjang (Pujiriyani dkk, 2014).

Pemerintahan Presiden Jokowi menyusun masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia banyak diantaranya bertransformasi menjadi Proyek strategis nasional (PSN). Sejak dicanangkan, jumlah Proyek strategis nasional (PSN) mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya proyek yang sudah selesai, proyek yang dikeluarkan dari daftar Proyek strategis nasional (PSN) dan ada pula proyek baru yang dimasukkan ke daftar berdasarkan pertimbangan instrumentalnya bagi pertumbuhan ekonomi. Pada 2016, terdapat 225 proyek yang masuk daftar Proyek strategis nasional (PSN), kemudian mengalami kenaikan menjadi 245 proyek di 2017. Pada 2018 terdapat 223 proyek dengan nilai total proyek mencapai Rp4.183 trilliun. Paling mutakhir, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek strategis nasional (PSN), daftar PSN diperbarui menjadi 201 proyek yang terbagi dalam 12 sektor dan enam program dalam daftar Proyek strategis nasional (PSN) termasuk di dalamnya program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Berikut adalah 10 Proyek strategis nasional Yang Sudah Diselesaikan sebagai berikut:



Gambar 1. 10 Proyek strategis nasional Yang Sudah Diselesaikan
Sumber: Indonesia Baik.id, 2019.

Pada gambar diatas menjelaskan sesuai dengan amanat Perpres No.3/2016 j.o Perpres No.58/2017 pemerintah menargetkan sebanyak 68 Proyek strategis nasional (PSN) bisa rampung dan beroperasi hingga tahun 2019. Perlu diketahui hingga akhir 2016 sebanyak 20 proyek telah selesai dengan nilai Rp33,3 triliun. Kemudian di akhir 2017, ada 10 proyek yang selesai dengan nilai Rp 61,5 triliun. Sementara pada 2018, dari 222 proyek dan 3 program yang masuk PSN dengan total nilai investasi Rp 4.100 triliun, sebanyak 13 proyek akan selesai dengan nilai proyek Rp 46,78 triliun. Di tahun ini, 66 proyek dan 1 program ketenagalistrikan serta 1 program pemerataan ekonomi akan masuk dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi sebagian.

Secara geografis, persebaran PSN tampak masih terpusat di Jawa meski pemerintah sendiri mengklaim bahwa PSN ini merupakan strategi untuk pemerataan pembangunan dan menjawab defisit infrastruktur yang menjadi permasalahan akut di luar Jawa. Permasalahan ini terjadi di proyek strategis nasional yang berlokasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang akan dibuat untuk pembangunan Bendungan Marga Tiga yang dilakukan mulai tahun 2017 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dengan menggandeng kontraktor pelaksana PT. Waskita Karya-PT Adhi Karya (KSO). Bendungan Marga Tiga dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 hektare, yakni DI Jabung kiri 5.638 ha dan potensi DI Jabung kanan 10.950 ha (Wardana, 2022).

Salah satu contoh konflik yang terjadi dapat dilihat dari faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi sudah banyak di Indonesia karena adanya kepentingan-kepentingan disetiap individu. Di Lampung Timur misalnya, bisa menjadi salah satu contoh betapa kepentingan disetiap individu ataupun kelompok menjadi faktor penting terjadinya konflik. Warga Marga Tiga berusaha mendapatkan hak dan

mempertahankan hak mereka guna melanjutkan kepentingan hidup. Sedangkan di pihak pemerintah melakukan pembebasan lahan yang terjadi di Bendungan Marga Tiga (PUPR, 2023).

Bendungan berkapasitas tampung 42,31 juta m³ dengan luas genangan 2.314 ha tersebut juga akan memasok air baku sebesar 0,8 m³/detik untuk Kabupaten Lampung Timur. Bendungan dengan konstruksi tipe urugan yang memiliki tinggi panjang puncak 321,76 meter, dan lebar puncak 7 m diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 m³/detik untuk sebagian wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur (PUPR, 2023).

Berawal pada tahun 2017 dimulainya proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga yang terletak di desa Trisinar dan Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Bendungan Marga Tiga dibangun yang bertujuan untuk irigasi di wilayah Kecamatan Jabung Rawa Sragi seluas 15000 ha. Dampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga menggenangi 23 Desa dan 4 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Pada Januari 2020 Gubernur Lampung melakukan penetapan lokasi untuk lahan yang akan terdampak genangan Bendungan Marga Tiga. Setelah itu pada pertengahan tahun 2021 dilakukan pengukuran lahan oleh tim satgas yang terdiri dari beberapa dinas terkait. Sekitar awal tahun 2022 mulai adanya pencairan uang ganti kerugian yang diterima masyarakat genangan Bendungan Marga Tiga berjalan dengan lancar dan berjalan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut begitu berbeda dengan bendungan yang dibuat pada zaman Presiden Jokowi yaitu Bendungan Way Sekampung. Bendungan Way Sekampung yang terletak di Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari program pembangunan 65 bendungan dan telah diresmikan pada tanggal 02 September 2021 dengan masa bangun selama lima tahun. pembangunan bendungan ini bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Bendungan Way Sekampung ini sebagian besar digunakan untuk tegal,

sawah, dan perkebunan. Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m³ yang akan memberikan pasokan air irigasi seluas 72.707 hektar, potensi listrik 5,4 MW, penyediaan air bersih sebesar 2,482 l/detik hingga menjadi sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, serta mereduksi banjir 185 m³ /detik. Dengan kebutuhan tanah seluas 830 hektar yang meliputi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus (PUPR, 2018).

Bendungan Way Sekampung mulai dibangun sejak September 2016 sedangkan pembebasan lahan dimulai pada tahun 2015. Pembebasan lahan meliputi lahan-lahan masyarakat berupa rumah, sawah dan, kebun masyarakat. Kondisi lahan di daerah pembangunan bendungan ini secara umum digunakan oleh masyarakat setempat mayoritas sebagai petani dan buruh pertanian. Usaha pertanian yang dilakukan masyarakat adalah bercocok tanam terutama padi pada musim hujan dan palawija pada musim kering. Tanaman pada musim kering yang dibudidayakan adalah tanaman sayursayuran, jagung, cabe dan lain-lain. Bendungan Way Sekampung ini diresmikan pada Tahun 2020-2021 (Viki, 2023).

Berbeda dengan Bendungan Marga Tiga pada agustus 2022 lalu media dihebohkan dengan beragam berita terkait konflik agraria berkaitan dengan pembebasan lahan yang terjadi di Bendungan Marga Tiga. Konflik ini bersumber dari lamanya proses pembebasan lahan yang cukup lama sehingga membuat masyarakat frustrasi. Setelah itu masyarakat juga tidak puas atas kebijakan yang dibuat oleh masyarakat. Permasalahan tentang konflik agraria yaitu tanah register yang dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah juga menggunakan audit dengan Citra Satelit yang merugikan masyarakat.

Selain konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah yang menyebabkan hilangnya *public trust*, penulis mendapatkan sumber informasi pra riset pada persoalan ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik vertikal

antara pemerintah dan warga Trimulyo. Berdasarkan yang diuraikan salah satu warga Trimulyo ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus pada Bendungan Marga Tiga yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap kasus mark up atau tanaman fiktif pada pembebasan lahan genangan Bendungan Marga Tiga yang menggunakan sistem penghitungan baru yaitu menggunakan sistem citra satelit sangat-sangat merugikan masyarakat dikarenakan jika menggunakan sistem tersebut tanaman milik masyarakat sebelum penetapan lokasi pada januari 2020 pun banyak yang tidak masuk
2. Jika menggunakan sistem penghitungan citra satelit seharusnya dilakukan pada semua pihak yang terdampak genangan bukan justru menjadikan tumbal petani terdampak yang belum menerima uang ganti kerugian saja, tetapi harus dilakukan pada para pihak yang sudah menerima uang ganti kerugian juga. Kalau bisa diterapkan seperti itu petani yang belum menerima ganti rugi tidak merasa dirugikan atau dijadikan tumbal. Artinya hukum tidak boleh tebang pilih tumpul keatas tajam kebawah.

Perbedaan bendungan Way Sekampung dengan Bendungan Marga Tiga terletak banyaknya kasus yang terjadi di Bendungan Marga Tiga. Bendungan Way Sekampung Hasil analisis dengan MDS ternyata tidak hanya faktor infrastruktur dan faktor ketersediaan dana saja yang menjadi faktor kunci tetapi juga faktor atau aspek pariwisata juga menjadi atribut sensitif yang harus diintervensi untuk ditingkatkan nilai keberlanjutannya. Kajian ini telah berhasil mengidentifikasi faktor kunci status keberlanjutan yang dapat dipakai dalam mengelola pendayagunaan sumber daya air di Way Sekampung. Seperti pada dimensi ekonomi meningkatkan faktor ketersediaan dana untuk membangun infrastruktur serta kelembagaan ekonomi, pada dimensi ekologi maupun sosial pemerintah saling memberikan kinerja yang besar untuk keterlibatan pembangunan bendungan Way Sekampung sampai saat ini.

Permasalahan yang ada di Bendungan Marga Tiga seperti tentang masyarakat desa Trimulyo yang memiliki tanah di desa Trisinar dan Mekar Mulya menuntut soal adanya ganti rugi tanah dan tanam tumbuh dilahan yang statusnya register 37 hutan produksi. Masyarakat sudah menduduki dan mengelola lahan terus sejak tahun 1966. Pemerintah sendiri pernah mengatakan pada acara rapat percepatan penyelesaian lahan eks kawasan kehutanan bahwa menurut PP No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan untuk hutan yang dikuasai masyarakat lebih dari 20 tahun berturut-turut dapat diganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanahnya dan Sistem audit citra satelit terhadap tanam tumbuh masyarakat disini persolannya dari total 6600 bidang tanah masyarakat yang terkena dampak genangan Bendungan Marga Tiga sebanyak 4600 bidang tanah tidak diaudit dengan menggunakan sistem citra satelit, tetapi berbeda dengan nasib sisa dari dampak genangan Bendungan Marga Tiga sebanyak 2000 bidang harus diaudit dengan sistem citra satelit yang sangat merugikan petani. Sehingga dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak akibatnya masyarakatlah yang dirugikan.

Konflik harus dikelola menggunakan strategi tertentu yang nantinya menghasilkan keputusan agar menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang berkonflik seharusnya memiliki strategi serta mencapai keluaran konflik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Konflik Bendungan Marga Tiga harus dikelola menggunakan strategi tertentu yang nantinya menghasilkan keputusan agar menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang berkonflik seharusnya memiliki strategi serta mencapai keluaran konflik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hassan Hasbi (2019) dengan judul Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang–Semarang bahwa Proses Pengadaan Tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum pada umumnya akan penuh

dengan masalah. Hal ini disebabkan karena kepentingan umum selalu mengorbankan kepentingan pribadi, dan ketersediaan tanah yang terbatas. Dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Batang – Semarang, terdapat beberapa permasalahan namun dapat teratasi dengan baik oleh tim pengadaan tanah. Hal ini menjadi faktor ketertarikan peneliti dalam meneliti manajemen konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Batang – Semarang.

Pelaksanaan manajemen konflik dan negosiasi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Batang – Semarang telah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa tahapan dalam pengadaan tanah yang belum efektif dimana yang mengakibatkan efek menjadi melesetnya target penyelesaian dalam pengadaan tanah. Terdapat 598 Bidang tanah milik penduduk yang melakukan penolakan terhadap pengadaan tanah ini tetapi hal ini dapat diatasi oleh pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah harus lebih aktif dalam proses pendekatan atau pemberian pemahaman kepada masyarakat, serta harus lebih transparan kepada warga terkait harga dari hasil penilaian tim Apprsial mengenai hal apa yang menjadi dasar penilaian dari tim apprisial.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devy Indah Paramitha (2022) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Perdamaian Dan Manajemen Konflik: Studi Kasus Konflik Thailand Selatan bahwa Di dalam sebuah tatanan kenegaraan, Pemerintah merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan guna mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara. Demikian pula jika terjadi sebuah konflik yang dapat mengancam keamanan negara, maka pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam proses manajemen konflik agar tidak tereskalasi sehingga mampu menciptakan kondusifitas agar tercapai sebuah perdamaian. Demikian halnya dengan pemerintah Thailand, yang mana memiliki peranan cukup besar dalam proses manajemen konflik di Thailand Selatan yang hingga sampai saat ini masih terus bergejolak.

Witrianto (2015) yang berjudul *Manajemen Konflik Dalam Pembangunan Masyarakat Di Mimika Papua* dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu negara bukan hanya menjadi milik atau menjadi beban tanggungan negara itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik negara-negara lain. Persoalan-persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau berskala global, kendati tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika Papua merupakan salah satu proyek pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat ini antara lain dipicu oleh dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek penambangan ini dan manfaat ekonomi yang tidak terlalu dirasakan oleh penduduk asli karena proyek ini lebih menggunakan tenaga kerja dari penduduk pendatang sehingga menimbulkan rasa tidak puas di kalangan penduduk asli yang kemudian memicu terjadinya konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Azifa US (2022) yang berjudul *Manajemen Konflik Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Kota* bahwa Pengesahan UU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari serikat pekerja dan mahasiswa di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis langkah, gaya, dan strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam konflik penolakan tersebut. manajemen konflik sudah diterapkan secara keseluruhan namun belum terdapat solusi yang disepakati bersama. Gaya manajemen konflik yang paling dominan diterapkan yakni gaya dominating, dimana seluruh pihak yang terlibat masih berpegang teguh pada keinginan masing-masing. Strategi manajemen konflik yang digunakan yakni menang-kalah, pihak yang menang yakni legislatif, pemerintah, dan pengusaha, sedangkan pihak yang kalah yakni pihak penolak yang terdiri atas pekerja dan mahasiswa.

Sebagaimana tertulis dilatar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana kasus proyek strategis nasional yaitu Bendungan Marga Tiga karena penelitian ini belum pernah diteliti peneliti lain Di Lampung Timur terutama pada konflik Bendungan Marga Tiga, bisa menjadi salah satu contoh betapa kepentingan disetiap individu ataupun kelompok menjadi faktor penting terjadinya konflik. Warga Marga Tiga berusaha mendapatkan hak dan mempertahankan hak mereka guna melanjutkan kepentingan hidup. Sedangkan di pihak pemerintah melakukan pembebasan lahan yang terjadi di Bendungan Marga Tiga. Hal tersebut dinilai tidak adil oleh masyarakat. Maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **"Manajemen Konflik Pembebasan Lahan Proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga (Studi di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab konflik pembebasan lahan dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Marga Tiga?
2. Bagaimana Pemerintah melakukan manajemen konflik?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab konflik pembebasan lahan dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Marga Tiga.
2. Menganalisis manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi tentang praktik manajemen konflik dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

2) Manfaat Praktis

- a. Masyarakat dapat mengetahui tentang peta konflik dalam pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Marga Tiga dan peluang untuk memperjuangkan kepentingannya.
- b. Pemerintah dapat mengetahui peta konflik, penyebab konflik dan peluang penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam pembangunan Bendungan Marga Tiga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara

Konflik (*conflict*) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2002) konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik (dalam Maftuh, 2005) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena itu mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan.

Bendungan Way Sekampung dengan Bendungan Marga Tiga terletak banyaknya kasus yang terjadi di Bendungan Marga Tiga. Bendungan Way Sekampung Hasil analisis dengan MDS ternyata tidak hanya faktor infrastruktur dan faktor ketersediaan dana saja yang menjadi faktor kunci tetapi juga faktor atau aspek pariwisata juga menjadi atribut sensitif yang harus diintervensi untuk ditingkatkan nilai keberlanjutannya, Oleh karena itu konflik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Konflik Konstruktif: Fokus pada isu tertentu dengan tetap menghormati pandangan orang lain.
2. Konflik Relasional: Lebih menekankan pada karakteristik individu daripada isu yang mendasari konflik.
3. Konflik Sosial Terjadi antara individu dan kelompok atau antar kelompok yang berbeda dalam hal budaya, nilai, dan kepentingan

Konflik biasanya dimulai dari ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap situasi tertentu. Ketika pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa kepentingan mereka terancam, masyarakat di Bendungan Marga Tiga berusaha mendapatkan hak dan mempertahankan hak mereka guna melanjutkan kepentingan hidup. Maka konflik dapat berkembang menjadi pertentangan terbuka. Proses ini sering kali melibatkan tahap-tahap seperti:

1. Identifikasi Masalah: Pihak-pihak mulai menyadari adanya perbedaan.
2. Komunikasi: Diskusi atau negosiasi untuk mencari solusi.
3. Peningkatan Ketegangan: Jika tidak ada resolusi, ketegangan dapat meningkat.
4. Konfrontasi: Terjadi pertentangan langsung antara pihak-pihak yang berkonflik.

2.2 Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*)

dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Definisi manajemen Konflik menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik (Wahyudi, 2006:17).

Menurut Stoner konflik organisasi ialah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian (Wahyudi, 2006:17). Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (Pickering, 2001). Menurut Ismail (2008: 65), tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilih menjadi lima kelompok yakni:

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain;
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform;
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Definisi mengenai sengketa pertanahan, mendapat sedikit penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Permasalahan sengketa tanah ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di negara ini belum tertib dan terarah. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara hati-hati. Untuk kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Stevenin (2000), terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

1. Pengenalan Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).
2. Diagnosis Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
3. Menyepakati suatu solusi Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.
4. Pelaksanaan Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.

5. Evaluasi Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Manajemen konflik dalam organisasi pendidikan sangat penting untuk menciptakan harmoni dan meningkatkan produktivitas. Konflik sering kali muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, dan tujuan antara individu atau kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berdampak negatif pada produktivitas organisasi dan hubungan interpersonal (Hasanah, 2020). Namun, ketika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi peluang untuk inovasi, peningkatan kerja sama, dan penyelesaian masalah yang lebih kreatif (Moad, Nur, & Hasanah, 2023).

Menurut Mu'alimin et al. (2024), terdapat lima gaya utama dalam manajemen konflik berdasarkan model Thomas-Kilmann, yaitu kompetitif, kolaboratif, menghindar, akomodatif, dan kompromi. Masing-masing gaya memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda. Gaya kolaboratif, misalnya, mendorong penyelesaian konflik dengan solusi yang saling menguntungkan, sedangkan gaya kompetitif lebih sesuai untuk keputusan cepat dalam situasi mendesak (Tahir, Rahman, & Kadir, 2012). Pemilihan gaya yang sesuai sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik (Zamil, 2024). Penelitian oleh Rifa'i (2023) juga menunjukkan bahwa manajemen konflik dapat digunakan sebagai media dalam penanganan konflik di lembaga pendidikan, yang mengindikasikan pentingnya pemilihan gaya yang tepat dalam konteks pendidikan (Rifa'i, 2023).

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Killmann (dalam Wirawan, 2010). Manajemen konflik membutuhkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyusun strategi konflik dan menerapkannya agar menghasilkan penyelesaian yang diinginkan. Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, diantaranya kompetisi (*competiting*) atau

komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaborating*) atau komitmen (*commitment*), kompromi (*compromising*), menghindar (*avoiding*), mengakomodasi (*accommodating*). Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen konflik, pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu.

Alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono (2000:28-31) adalah: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good office*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*. Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “*Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*”, menjelaskan bahwa ADR “*is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*” (Jacqueline, 1991).

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni “*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.

- 1) Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh

para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

- 2) Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.
- 3) Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Pada teori yang cocok digunakan pada permasalahan Bendungan Marga Tiga yaitu Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Gaya manajemen konflik ini sangat cocok digunakan untuk manajemen konflik pembebasan lahan Proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Marga Tiga.

Pemerintah seharusnya memiliki kewajiban dalam manajemen konflik yang baik pada konflik Bendungan Marga Tiga karena pemerintah tidak hanya berkewajiban melaksanakan pembangunan infrastruktur tetapi juga harus secara aktif mengelola dan menyelesaikan konflik yang muncul agar berjalan dengan baik seperti:

- 1) Pemerintah melakukan penetapan lokasi pembangunan melalui keputusan resmi yang melibatkan kajian teknis dan sosial agar proses berjalan transparan dan dapat diterima masyarakat terdampak
- 2) Pemerintah berkewajiban melakukan investasi ulang dan perhitungan ganti rugi yang adil setelah adanya penemuan manipulasi data oleh oknum tertentu agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
- 3) Pemerintah melakukan rapat koordinasi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan sosial, administrasi dan hukum yang muncul dari pembangunan bendungan agar konflik dapat diminimalisir.

2.2.1 Faktor penyebab Konflik

Faktor penyebab konflik atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soerjono Soekanto, 2006), antara lain:

- 1) Perbedaan antara individu-individu Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
- 2) Perbedaan kebudayaan Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

- 3) Perbedaan kepentingan Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Konflik data terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sependapat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.

Di samping itu, petunjuk atau gejala konflik juga dapat dibedakan kepada indikator-indikator sebagai berikut:

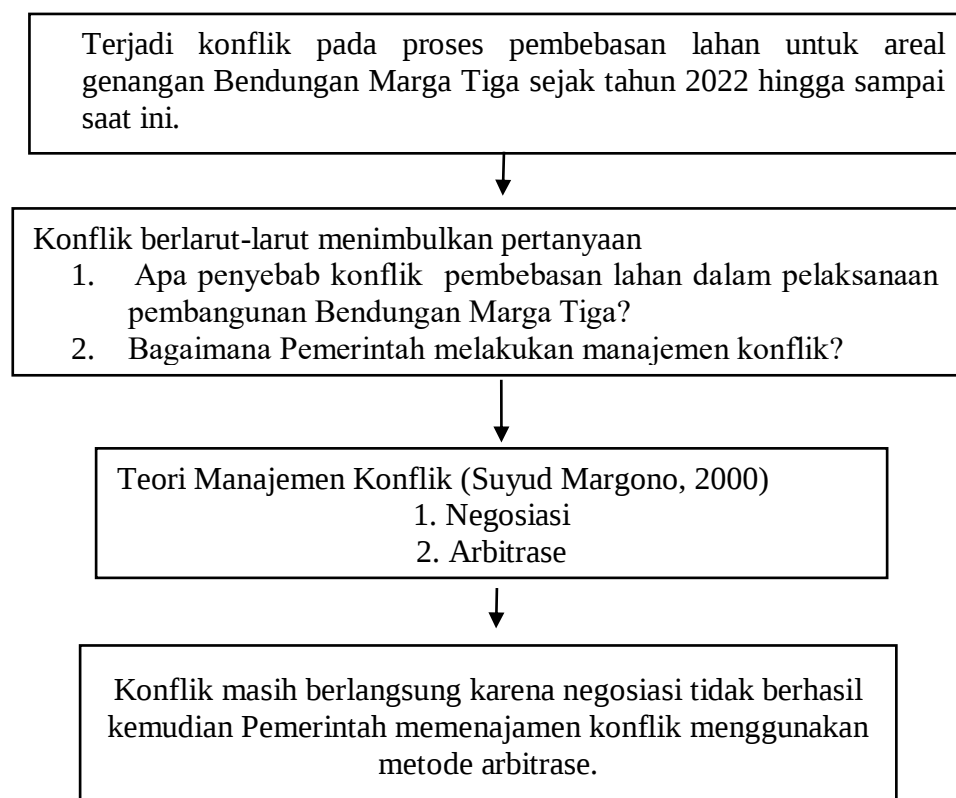
- 1) Gejala yang bersifat struktural dan melembaga, atau sering dianggap sebagai latar belakang atau kondisi politik.
- 2) Gejala pemicu, yaitu peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya konflik.
- 3) Gejala akselerator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi paling rawan dalam masyarakat.

Pembedaan petunjuk atau gejala konflik dalam tiga indikator di atas terlihat lebih memperhatikan dimensi waktu, dalam arti gejala yang satu ada mendahului gejala yang lain atau terjadi dalam waktu yang “relatif” tidak bersamaan. Identifikasi dengan pendekatan ini tentunya akan berguna untuk membedakan sebab-sebab mana yang menjadi sebab utama dan mana pula yang menjadi faktor penyebab ikutan (yang berkembang kemudian).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab konflik dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Marga Tiga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Konflik terjadi antara masyarakat pemilik lahan yang akan terkena genangan air Bendungan Marga Tiga dengan Pemerintah. Pemerintah dalam tesis ini adalah panitia pengadaan tanah (P2T) yakni yang diketuai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur dan beranggotakan Dinas dan Instansi yang menangani dalam proses pembebasan lahan Bendungan Marga Tiga yaitu Dinas PUPR, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur.

Manajemen konflik yang digunakan untuk menganalisis tindakan Pemerintah dalam menangani konflik adalah negosiasi dan arbitrase. Secara ringkas disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan studi dalam kualitatif deskriptif yang dilakukan secara mendalam. Burhan Bungin (Ibrahim, 2015) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut. Sedangkan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017), menjelaskan metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang "Manajemen Konflik Pembebasan Lahan Proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi langkah-langkah dalam penyelesaian konflik. Metode penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya adalah wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik Bendungan Marga Tiga.

Metode penelitian ini merujuk pada kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Creswell (2010) dalam konteks penelitian kualitatif. Kerangka kerja ini menitikberatkan pada pengembangan pertanyaan penelitian dan prosedur

penelitian yang akurat, pengumpulan data dalam lingkungan partisipan, analisis data yang bermula dari informasi spesifik hingga konsep umum, dan penafsiran makna data yang diperoleh. Kemudian, pemilihan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan utamanya, yaitu menyusun deskripsi yang komprehensif mengenai "Manajemen Konflik Terhadap Masyarakat Terdampak Proyek strategis nasional Bendungan Marga Tiga (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" baik melalui sumber data primer maupun sekunder.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017). Penelitian ini akan dilakukan di Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Alasan memilih penelitian ini yaitu permasalahan Bendungan Marga Tiga sangat membuat resah masyarakat bukan hanya jadi isu di Lampung Timur tetapi sudah menjadi isu nasional. Secara tidak langsung peneliti ingin mencari kebenaran ada di masyarakat atau di Pemerintah karena melihat kondisi masyarakat sangat memperhatikan.

3.3 Penentuan Informan

Sumber informasi dalam penelitian berasal dari berbagai sumber. Seseorang yang memberikan informasi terkait topik khusus atau yang relevan dengan cakupan penelitian disebut sebagai informan, atau dalam beberapa konteks disebut sebagai sampel, sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014).

Dalam penentuan informan untuk penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan *purposive sampling* melibatkan pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian, berdasarkan keyakinan bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dengan aspek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti

memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, serta memiliki kapabilitas untuk memberikan wawasan mengenai konflik yang terjadi di Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

Adapun informan pada penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Sugiyatman	Kepala Desa Trimulyo	Bertanggung jawab sebagai salah satu pemerintah desa yang mengumpulkan masyarakat
2.	Agung Setiawan	Masyarakat	Masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga
3.	Katijo	Masyarakat	Masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga
4.	Alandes	Kasie Pengadaan BPN Lampung Timur	Bertanggung Jawab mulai dari konsultasi dengan masyarakat terkait pembangunan Bendungan Marga Tiga
5.	Ariansyah Ahmadin	PPK Bendungan Marga Tiga	Bertanggung Jawab mulai dari konsultasi dengan masyarakat terkait pembangunan Bendungan Marga Tiga
6.	Abu Hasan	Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN)	sebagai NGO yang berperan besar atas dampak atau kelestarian lingkungan.
7.	Bendi Juantara	Pengamat	Pengamat sebagai salah satu yang bisa membantu masyarakat dalam mencari solusi kepada pemerintah

3.4 Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara langsung dengan informan. Informan berasal dari pihak yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara, observasi dan pengamatan secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara tatap muka dengan informan yang telah diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Proses wawancara ini juga dilakukan dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, data yang terkumpul merupakan hasil dari interaksi langsung.

Data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan sejumlah informan. Dalam proses penentuan informan, penelitian ini menerapkan metode purposive sampling, yang merupakan pendekatan pengambilan sampel data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel yang berkaitan dengan konflik Bendungan Marga Tiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2023, keputusan Gubernur Lampung, berita online tentang Bendungan Marga Tiga, notulen rapat pengadaan tanah dan lain sebagainya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Mc Milan dan Schumacher (dalam Syamsuddin, 2009) mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2016), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Gunawan (2013).

Peneliti disini menggunakan Wawancara mendalam didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Kriyantono (2020), wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data melalui interaksi tatap muka. Moleong (2005) juga menyatakan bahwa wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan fokus pada masalah penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada:

- 1) Katijo pada 22 Maret 2025
- 2) Sugiyatman pada 22 Maret 2025
- 3) Agung Setiawan pada 22 Maret 2025
- 4) Bendi Juantara pada 21 April 2025
- 5) Abu Hasan pada 21 April 2025
- 6) Alandes pada 22 April 2025
- 7) Ariansyah pada 28 April 2025

3.5.2 Observasi

Metode observasi memegang peranan yang sangat penting dalam menguraikan dan menggambarkan gejala yang sedang berlangsung. Observasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara selektif sesuai dengan sudut pandang atau perspektif peneliti (Bungin, 2015). Penerapan teknik observasi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengakses data yang tidak dapat diperoleh melalui tahap wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan yang dilakukan di luar lingkup wawancara, sebagai pelengkap data primer penelitian.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, yang berarti pengamatan dilakukan tanpa panduan observasi yang spesifik, dan prosesnya berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2015). Pada penelitian ini peneliti mengobservasi bagaimana konflik yang terjadi pada Pembangunan di Bendungan Marga Tiga yang berlarut-larut.

3.5.3 Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Menurut Sudaryono (2017), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 2) Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
- 3) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/18/B.06/HK/2020
- 4) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/51/B.06/HK/2022
- 5) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/51/B.06/HK/2024
- 6) Berita online kompas tentang kasus korupsi Bendungan Marga Tiga
- 7) Notulen rapat pengadaan tanah pembangunan Bendungan Marga Tiga di BPN Lampung Timur

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian kemudian dilakukan pengolahan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Editing Data

Proses editing data bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko dkk, 2016). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh, dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan. Data yang didapatkan dari PSN Bendungan Marga Tiga dan Data Kepolisian.

3.6.2 Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Data yang telah

melalui proses editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2017). Sedangkan menurut Hikmawati (2017), analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data melibatkan serangkaian proses yang sistematis dalam mengelola dan mengolah data guna mendapatkan informasi yang relevan dan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian atau permasalahan yang ada. Proses ini meliputi pengumpulan, pemilahan, penyederhanaan, dan penyajian data dengan tujuan agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Miles dkk (2014), skema analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Data Condensation*.

Tahap ini melibatkan seleksi, fokus, simplifikasi, ringkasan, dan transformasi data dari transkrip, dokumen, atau bukti empiris lainnya menjadi data yang telah diolah dan siap untuk dianalisis. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses analisis data.

2. Tahap *Data Display*.

Pada tahap ini, data yang telah dikondensasi dalam tahap sebelumnya disajikan atau ditampilkan dalam format yang teratur dan ringkas. Hal

ini bertujuan agar data lebih mudah dimengerti dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan. Data display merupakan langkah penting dalam proses analisis data.

3. Tahap Drawing and Verifying Conclusion.

Tahap ini mencakup pengambilan dan verifikasi keputusan. Meskipun peneliti telah melakukan interpretasi data sejak awal pengumpulan, kesimpulan yang akurat dan jelas baru dapat diambil ketika seluruh tahapan pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya. Ini adalah tahap akhir dalam analisis data.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, di mana peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari data secara bottom-up. Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan sumber data dan informan, kemudian diorganisasi dalam kelompok tema sesuai dengan kerangka konsep.

3.8 Teknik Validasi Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Moleong (2017), triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Beberapa jenis triangulasi data adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen,

arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan melakukan wawancara terhadap lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi metode, yang melibatkan pemeriksaan data menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bila memungkinkan, mengacu kepada sumber data yang sama untuk memeriksa ketepatan informasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu melakukan teknik keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan para informan untuk memperoleh data guna mengetahui apakah terjadi perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian konflik Bendungan Marga Tiga antara masyarakatn NGO dan Pemerintah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Konflik pembangunan Bendungan Marga Tiga di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung sejak tahun 2022 dan hingga menjelang akhir tahun 2025 masih berlangsung. Berdasarkan pembahasan dan BAB IV diketahui empat penyebab konflik sebagai berikut:

- 1) Perbedaan data tanaman yang dimiliki masyarakat pemilik lahan dengan Pemerintah yang menggunakan alat yang namanya sistem citra satelit.
- 2) Lamanya proses ganti rugi lahan dalam pembebasan lahan Bendungan Marga Tiga.
- 3) Pemerintah lambat merespon apa yang menjadi kepentingan masyarakat.
- 4) Berkembang dikalangan masyarakat bahwa ada dugaan isu penyuapan terhadap panitia pengadaan tanah (P2T) dalam proses pembebasan lahan Bendungan Marga Tiga.

Manajemen konflik meliputi aspek negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dan arbitrase merupakan dua mekanisme penting yang digunakan dalam upaya penyelesaian sengketa pembebasan lahan, namun keberhasilan keduanya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola dan mengantisipasi potensi konflik sejak dini. Indikator dalam negosiasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan komunikasi dan kurangnya kejelasan informasi mengenai nilai ganti rugi, sehingga memunculkan ketidakpuasan dan penolakan dari masyarakat. Sementara arbitrase sebagai

mekanisme penyelesaian hukum formal terpaksa digunakan ketika negosiasi menemui jalan buntu, tetapi keberadaan arbitrase ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan manajemen konflik secara komprehensif dan preventif.

Pemerintah yang belum mampu melakukan manajemen konflik secara proaktif menyebabkan proses pembebasan lahan menjadi berlarut-larut, dengan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Situasi ini diperparah oleh pengawasan yang lemah atas proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi, yang akhirnya menimbulkan kasus hukum dan korupsi yang merugikan masyarakat dengan mengambil keputusan secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah. Manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah dalam konflik Bendungan Marga Tiga adalah negosiasi dan arbitrase. Konflik berlarut-larut dikarenakan penyebab konflik tidak terselesaikan dan model penyelesaiannya menggunakan negosiasi tidak membuahkan hasil. Pemerintah justru menerapkan arbitrase sebagai bentuk dari penyelesaian konflik pembebasan lahan Bendungan Marga Tiga.

5.1 Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan diatas, berbagai pihak perlu memperhatikan sebagai berikut:

- 1) Polda Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur hendaknya Penyelesaian hukum secara transparan dan tuntas seperti Aparat penegak hukum seperti perlu terus mendalami dan menuntaskan kasus korupsi pengadaan tanah, termasuk manipulasi data ganti rugi yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Penanganan yang adil dan transparan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mempercepat penyelesaian konflik dan juga penyelesaian hak-hak pihak ketiga secara komprehensif.
- 2) Kepada BPN Lampung Timur perlu memperbaiki sistem pengadaan tanah dan ganti rugi pengelolaan pembebasan lahan harus dilakukan dengan

mekanisme yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hindari praktik mark-up, manipulasi data, dan pungutan liar agar proses berjalan adil dan lancar. Sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Pemerintah BPN Lampung Timur dan pelaksana proyek perlu memberikan informasi yang jelas dan rutin kepada warga terdampak terkait status pembayaran ganti rugi, pelepasan lahan, dan perkembangan proyek. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpastian dan konflik sosial

- 3) Seyogyanya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung harus memiliki Pengawasan dan pengendalian internal yang ketat serta internal di instansi terkait, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dan pengadaan tanah
- 4) Masyarakat sebaiknya harus tetap tenang hindari perbuatan anarkis, dukung semua proses hukum yang sedang berjalan, jaga solidaritas kepada warga yang terdampak, dan terus aktif menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah setempat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik dan permasalahan yang selama ini menghambat pembangunan Bendungan Marga Tiga dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga bendungan dapat segera berfungsi optimal mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air di Lampung Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Brenda Lengkong, “Fungsi Pengakuan (*Recognition*) dalam Pelaksanaan Hubungan antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”, *Lex Administratum*, Vol.VI/ No.1/Jan-Mar/2018, 21
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 98-103.
- Fitri, N. N. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan). Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2016. 65 Bendungan untuk Ketahanan Pangan Indonesia
- Harmen, F. andika. 2023. Proyek strategis nasional, Dari Kita Untuk Bangsa, dikutip pada minggu, 17 november 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html>
- Hasanah, U. (2020b). Manajemen konflik dalam meningkatkan kualitas kerja pada lembaga pendidikan Islam. *Al-Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v10i1.6448>
- Kusuma, M. A. I., Hairunisa, H., Ramadhan, F. Z., Rokhim, Utomo, S., & Mu'alimin, M. (2024). Peran manajemen konflik dan cara penanganan konflik dalam organisasi sekolah. *CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 3(1), 20–24. <https://doi.org/10.58794/cerdas.v3i1.882>
- Lihat Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi,” *Jurnal Advokasi*, 3, 2 (2012), hlm. 120-30.
- Masrafi, Laode, 2023. Polda Lampung ungkap kerugian negara Bendungan Marga Tiga Rp439 miliar. [https://www.antaraneews.com/berita/3785484/polda-lampung-ungkap-kerugian-negara-bendungan-Marga Tiga-rp439-miliar](https://www.antaraneews.com/berita/3785484/polda-lampung-ungkap-kerugian-negara-bendungan-Marga-Tiga-rp439-miliar)

- Muchsin, Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah, Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Batam, 19-21 November 2007
- Oktavia, Vina. 2023. Kasus Korupsi Bendungan Marga Tiga Lampung, Satu DPO Ditangkap. Dikutip pada Kamis 30 Desember 2024.
[https://www.kompas.id/artikel/kasus-korupsi-bendungan-Marga Tiga-lampung-satu-dpo-ditangkap](https://www.kompas.id/artikel/kasus-korupsi-bendungan-Marga-Tiga-lampung-satu-dpo-ditangkap)
- Oktavia, Vina. 2023. Warga Terdampak Proyek Bendungan Marga Tiga Nantikan Ganti Rugi Lahan. Dikutip pada Kamis 30 Desember 2024.
[https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/28/warga-terdampak-proyek-bendungan-Marga Tiga-nantikan-ganti-rugi-lahan](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/28/warga-terdampak-proyek-bendungan-Marga-Tiga-nantikan-ganti-rugi-lahan)
- Pengurus LBH. 2023. Proyek strategis nasional Pemerintahan Jokowi 2017-2023 : Epicentrum Kekerasan bagi Rakyat dan Petani.
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-strategis-nasional-pemerintahan-jokowi-2017-2023-epicentrum-kekerasan-bagi-rakyat-dan-petani/>
- Pujiriyani, D. W. (2014). Pengadaan tanah dan problem permukiman kembali: skema pemberdayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (40), 633-648.
- PUPR, 2023. Perkuat Pengairan Daerah Irigrasi di Provinsi Lampung, Bendungan Marga Tiga Ditargetkan *Impounding* Desember 2023.
[https://pu.go.id/berita/perkuat-pengairan-daerah-irigrasi-di-provinsi-lampung-bendungan-Marga Tiga-ditargetkan-impounding-desember-2023](https://pu.go.id/berita/perkuat-pengairan-daerah-irigrasi-di-provinsi-lampung-bendungan-Marga-Tiga-ditargetkan-impounding-desember-2023)
- Raymond Cooper, “Rights of Pre-Emption and the Rule Against Perpetuities”,
<http://www.raymondcooper.co.uk/business-leases/rights-pre-emption-rule-perpetuities/>, diakses 1 November 2017
- Rifa’i, Y. (2023). Manajemen konflik kebijakan pembina pramuka terhadap kewajiban mengikuti penegak bantara dan laksana bagi siswa di Madrasah Aliyah YPP Jamanis. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(1), 151–155.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.156>
- Rian Adhivira Prabowo, “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No. 2, (2019),75

Sembiring, Jimmy Joses, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan, Visimedia: Jakarta

Siswanto, Manajemen Konflik. Penerbit Bumi Aksara ,Jakarta, 2011 hal : 92

Sujadi, S. (2018). Kajian tentang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1-24.

Sumarto, W. Sumarto, 2017 . Proyek Startegis Nasional (PSN) <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/proyek-strategis-nasional-psn>

Swela, A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 41-50.

Sybol C. Anderson. Lihat Anderson, 2009, Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity, London and New York: Continuum Books, hal. 37-45. Lihat juga Terry Lovell (ed.), 2007, (Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, London and New York: Routledge

Untuk diskusi lebih jauh tentang penggunaan alasan kesakralan dalam menolak proyek pembangunan lihat Agung Wardana, "Legal Engineering in a Contest over Space in Bali", *Australian Journal of Asian Law*, 19, 1 (2017), hlm. 1-12.

Wahyudi, 2008, Manajemen Konflik: Pedoman Praktek Bagi Pemimpin Visioner, Alfabeta: Bandung

Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek strategis nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1-41.

Zamil, M. (2024). Gaya manajemen konflik kepala sekolah. *Al-Muttaqin*, 9(2), 60–65. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v9i2.2558>